

ABSTRAK

Darus Amin (121 0922 019), KAJIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN FIDUSIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999, dibawah bimbingan Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH.,APU. dan Dr. St Laksanto Utomo, SH.M. Hum.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan serta benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Permasalahan dalam tesis ini adalah terdapat perumusan UU Fidusia belum mencerminkan adanya kepastian hukum, karena rumusan norma yang masih menimbulkan penafsiran ganda dan terdapat pasal-pasal UU bertentangan satu sama lain.

Dengan metode penelitian normative yuridis diketahui ketidak sinkronan materi pasal-pasal tersebut antara lain : pengertian benda pasal 1 ayat 4, cakupan benda jaminan fidusia pasal 1 ayat 2; Pasal 2 tidak sinkron dengan pasal 38 dan pasal 37 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 11 ayat (1) adalah pendaftaran “benda jaminan fidusia”, sedangkan pasal 12 pendaftaran “jaminan fidusia” dan lain-lainnya.

Sedangkan hasil penelitian teknis administratif, pendaftaran fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tingkat propinsi, sedangkan di Kabupaten/Kotamadya belum ada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Saran penulis adalah memperhatikan asas kejelasan perumusan Undang-Undang, sistematika, pemilihan kata (istilah), bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan teknis administratif perlu diupayakan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tingkat Kabupaten/Kotamadya atau melalui sistem *online*.

Kata Kunci : Pelaksanaan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.

ABSTRACT

Darus Amin (121 0922 019), LEGAL STUDY OF FIDUCIARY IMPLEMENTATION IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 42 OF 1999, under the guidance of Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU. and Dr. St. Laksanto Utomo, SH.,M. Hum.

Law Number 42 of 1999 concerning Guarantee fiduciary. Fiduciary is a transfer of ownership rights as well as objects on the basis of trust with the provision that the objects are transferred ownership rights remain in control of the object owner.

The problem in this thesis is the formulation of the Law are not yet reflect Fiduciary legal certainty, because the formulation of norms that still cause double interpretation, and there are articles of Law contradict each other.

With normative juridical research methods, known not to synchronized each material in these Section. that is: Definition of object Article 1, Section 4, guarantees object fiduciary coverage article 1, paragraph 2; Section 2 does not sync with section 38 and section 37 paragraph 1, 2 and 3; Section 11 paragraph (1) is the registration of "fiduciary security objects", while Section 12 registration "fiduciary insurance" and others.

While the results of the technical study of administrative, fiduciary registration can be done at Fiduciary Registration Office (KPF) at the provincial level, while at the district / municipality no Fiduciary Registration Office.

The author suggests to observe the principle of clarity of the formulation of the Act, systematic, choice of words (terms), legal language is clear and easy to understand not cause a variety of interpretations in its implementation. While technically it is necessary the existence of administrative Fiduciary Registration Office (KPF) in the District / Municipality or through an online system.

Keywords: Fiduciary Implementation, Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999.